

DETERMINAN KEMISKINAN DI PULAU JAWA PERIODE 2014-2023



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU ILMU EKONOMI ISLAM**

OLEH:

ACHMAD SYAFRIZAL CHOIRI

NIM.21108010110

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

DETERMINAN KEMISKINAN DI PULAU JAWA PERIODE 2014-2023



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU ILMU EKONOMI ISLAM**

OLEH:

ACHMAD SYAFRIZAL CHOIRI

NIM.21108010110

DOSEN PEMBIMBING:

DHIYAUL AULIA ZULNI, M.E.

NIP. 19951109 000000 2 101

PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-120/Un.02/DEB/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : DETERMINAN KEMISKINAN DI PULAU JAWA PERIODE 2014-2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD SYAFRIZAL CHOIRI
Nomor Induk Mahasiswa : 21108010110
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dhiyaul Aulia Zulni, M.E.
SIGNED

Valid ID: 694b646a8fd



Penguji I
Prof. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69766da79390



Penguji II
ANGGARI MARYA KRESNOWATI, M.E.
SIGNED

Valid ID: 694ab16afb151



Yogyakarta, 16 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
SIGNED

Valid ID: 69785f5b4b68

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Achmad Syafrizal Choiri

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Syafrizal Choiri

NIM : 21108010110

Judul Skripsi : Determinan Kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2014-2023

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta,

Pembimbing



Dhiyaul Aulia Zulni, M.E.

NIP. 19951109 000000 2 101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621. 512474, Fax: (0274) 586117
E-mail: febi@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Achmad Syafrizal Choiri
NIM : 21108010110
Pembimbing : Dhiyaul Aulia Zulni, M.E.
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

"Determinan Kemiskinan di Pulau Jawa Periode 2014-2023"

No.	Tanggal	Konsultasi Ke-	Materi Bimbingan	Ttd Pembimbing
1.	11 Nov 2024	1	Judul Penelitian	
2.	30 Mei 2025	2	Konsultasi Bab I – Bab III	
3.	13 Juni 2025	3	Revisi Bab I – Bab III	
4.	20 Juni 2025	4	Revisi Bab I – Bab III	
5.	4 Juli 2025	5	Revisi Bab I – Bab III	
6.	18 Juli 2025	6	Variabel Penelitian diganti, dan Menambah Wilayah Penelitian	
7.	25 Juli 2025	7	Konsultasi Olah Data	
8.	8 Ags 2025	8	Konsultasi Bab I – Bab III	
9.	22 Okt 2025	9	Acc Ujian Seminar Proposal	
10.	29 Okt 2025	10	Konsultasi Bab IV – Bab V	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
E-mail: feb@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

11.	3 Des 2025	11	Perbaikan Penulisan dan Perbaikan Hipotesis	
12.	8 Des 2025	12	Acc Ujian Munaqosyah	

Yogyakarta, 8 Desember 2025
Pembimbing

Dhiyaul Aulia Zulni, M.E.
NIP: 199511090000002101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Syafrizal Choiri

NIM : 21108010110

Jurusan/Progam Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi berjudul "**Determinan Kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2014-2023**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta,
Penyusun

Achmad Syafrizal Choiri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK

KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Syafrizal Choiri
NIM : 21108010110
Progam Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Determinan Kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2014-2023”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada tanggal:



(Achmad Syafrizal Choiri)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTO

“Kerjakanlah Sesuatu Sesuai Dasar Yang Berlaku”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan tidak kurang sedikitpun rasa syukur, skripsi inni saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa tiada henti, dukungan yang tak terbatas, dan pengorbanan yang tak ternilai. Setiap tetes keringat dan jerih payah Bapak dan Ibu selalu menjadi motivasi alasan mengapa saya selaku penulis terus berdiri kokoh untuk menyelesaikan perjalanan pendidikan ini. Juga tidak lupa kepada Kakak saya yang selalu menjadi penyamangat dan teladan bagi saya dalam perjuangan ini.

Terima kasih atas semua doa, usaha, bimbingan dan kesabaran dalam menemani proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa itu semua tulisan sederhana ini tidak akan pernah terselesaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata bahasa Arab yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	sa	ṡ	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha titik di atas
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es titik di bawah

ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik di bawah
ع	Ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>`iddah</i>

C. Ta Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-	Fathah	Ditulis	A
-	Kasrah	Ditulis	I
-	Dhammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	A <i>Jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati يسعي	Ditulis	A <i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati كريم	Ditulis	I <i>Karīm</i>
dammah + wawu mati فروض	Ditulis	U <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya mati بينكم	Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
fathah + ya mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) -nya

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemberi Petunjuk lagi Maha Mengabulkan, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Determinan Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2014-2023” ini. Shalawat serta salam, tak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, yang mana menjadi penunjuk jalan bagi manusia di muka bumi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, SE., M.Si., Ak., ACPA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan pengarahan dan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu.
4. Ibu Dhiyaul Aulia Zulni, M.E., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan arahan atas ketidaktahuan penulis, serta memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Riswanti Budi Sekarningsih, M.SC., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat yang berharga selama proses perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman selama proses perkuliahan.
7. Segenap pegawai Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bantuan administratif yang memudahkan proses akademik.
8. Kepada kedua orang tua penulis, beliau Bapak Muh Arifin dan Ibu Siti Choiriyah yang selalu memberikan dukungan baik secara materi maupun non-materi, serta yang selalu memberikan motivasi, nasehat dan mendo'akan penulis. Tentunya jasa dari kedua orang tua tidak akan mampu penulis balas dalam bentuk apapun dan sekali lagi tulus dari hati terdalam penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
9. Kepada Kakak dan keluarga yang selalu mendukung penuh atas penelitian ini serta tidak lupa Putri kecilnya Shanum yang selalu memberikan semangat dengan kalimat khasnya "Semangat Celici om".
10. Kepada keluarga besar Yayasan Al-Mahali terkhusus keluarga Ibu Nyai Hj. Nadhiroh Mujab yang selalu membimbing saya dalam perjalanan mencari ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Keluarga besar Eksyar 21 yang telah banyak membantu penulis dalam menghadapi kesulitan perkuliahan dan memberikan pengalaman pertemanan yang berharga.

12. Terima kasih ditujukan kepada diri sendiri yang telah memberikan semangat, ketekunan, kesabaran, serta tekad kuat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya ini menjadi langkah awal untuk terus mengasah diri menuju kesuksesan dan meraih lebih banyak pencapaian di masa yang akan datang.

13. Kepada nama dibalik NIM 21104080058 yang senantiasa juga memberikan dukungan dan masukan serta *boost energy* tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

14. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan dan bantuan yang kalian berikan kepada penulis.

Semoga skripsi ini dapat memberi kontribusi yang bermanfaat bagi pembaca, dan memberi ilmu pengetahuan bagi generasi atau peneliti di masa depan yang tertarik untuk mempelajari topik ini. Atas doa, bantuan, dan dukungan berbagai pihak diatas, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberi pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang terlibat. Aamin

Yogyakarta, 28 November 2025

Penyusun



Achmad syafrizal Choiri

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	iv
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK.....	viii
KEPENTINGAN AKADEMIK.....	viii
HALAMAN MOTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	37
C. Tujuan Penelitian.....	38
D. Manfaat Penelitian	39
E. Sistematika Penulisan	39
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	30
A. Landasan Teori	30
1. Kemiskinan	30
2. Penanaman Modal Asing.....	35
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	39
4. Indeks Pembangunan Manusia.....	40
B. Kajian Pustaka.....	44
C. Kerangka Pemikiran.....	46
D. Pengembangan Hipotesis	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	53

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Populasi dan Sampel	53
C. Jenis dan Teknik Pengambilan Data.....	54
D. Definisi Operasional Variabel	55
E. Metode Analisis Data	60
1. Persamaan Model Residual	61
2. Pemilihan Model	62
3. Pengujian Asumsi Klasik	63
F. Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	65
1. Uji T (Parsial).....	66
2. Uji F (Simultan)	66
3. Uji Koefisien Determinasi R Square.....	66
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	79
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	79
B. Analisis Statistik Deskriptif	81
C. Pemilihan Model Regresi Data Panel	84
D. Analisis Uji Asumsi Klasik	86
E. Analisis Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	89
F. Analisis Uji Hipotesis	92
G. Pembahasan.....	96
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
H. Keterbatasan dan Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	VII
Lampiran 1	VII
Lampiran 2	X
CURRICULUM VITAE	XVIII

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	54
Tabel 4. 1 Luas wilayah provinsi di Pulau Jawa	65
Tabl 4. 2 Jumlah penduduk Provinsi di Pulau Jawa tahun 2024	65
Tabel 4. 3 Hasil analisis statistik deskriptif.....	67
Tabel 4. 4 Haisl uji chow-test.....	68
Tabel 4. 5 Hasil Uji Hausman-test	69
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	70
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	71
Tabel 4. 8 Hasil Estimasi model FEM	71
Tabel 4. 9 Hasil Estimasi model FEM (SUR).....	72
Tabel 4. 10 Hasil Uji T	74
Tabel 4. 11 Uji F Simultan	75
Tabel 4. 12 Hasil Koefisien Determinasi	76
Tabel 4. 13 Ringkasan Hasil Uju Hippotesis	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tiga Pulau dengan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2014-2023	2
Gambar 1. 2 Nilai Penanaman Modal Asing Pada Pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan	5
Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia dari Pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan.....	7
Gambar 1. 4 Jumlah Kemiskinan di Pulau Jawa.	9
Gambar 1. 5 IPM di Pulau Jawa.....	12
Gambar 1. 6 PMA di Pulau Jawa	17
Gambar 1. 7 TPAK di Pulau Jawa.....	20
Gambar 4. 1 Peta Pulau Jawa	64
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas.....	70

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman Modal Asing (PMA), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), serta jumlah penduduk sebagai variabel kontrol terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model guna melihat hubungan antarvariabel dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik antarprovinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat terbukti mampu menekan tingkat kemiskinan. Sementara itu, PMA tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa investasi asing belum sepenuhnya mampu menyentuh kelompok masyarakat miskin atau belum optimal dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan. Variabel TPAK juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, yang mengisyaratkan bahwa meningkatnya partisipasi tenaga kerja belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pekerjaan dan pendapatan. Jumlah penduduk sebagai variabel kontrol juga tidak memberikan pengaruh signifikan, meskipun secara teoritis berkaitan dengan dinamika kemiskinan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor paling penting dalam menurunkan kemiskinan di Pulau Jawa. Temuan ini memberikan implikasi bahwa kebijakan pembangunan sebaiknya lebih difokuskan pada peningkatan IPM melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat guna mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Penanaman Modal Asing, TPAK, jumlah penduduk, kemiskinan, data panel.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the Human Development Index (HDI), Foreign Direct Investment (FDI), Labor Force Participation Rate (LFPR), and population as a control variable on poverty levels in Java Island. The analysis was conducted using panel data regression with a Fixed Effect Model approach to capture variations across provinces and over time. The findings indicate that HDI has a negative and significant effect on poverty, implying that improvements in education, health, and living standards effectively contribute to reducing poverty. Meanwhile, FDI does not show a significant effect on poverty, suggesting that foreign investment has not been fully optimal in supporting poverty reduction or has not yet created inclusive economic benefits for the poor. LFPR also does not demonstrate a significant effect, indicating that increased labor participation has not been sufficiently followed by improvements in job quality and income levels. Population as a control variable does not significantly affect poverty, although theoretically it remains related to demographic and economic dynamics. Overall, this study highlights that human capital quality is the most crucial factor in reducing poverty in Java Island. These findings imply that development policies should focus more on strengthening human development through improvements in education, health services, and community welfare in order to support sustainable poverty reduction.

Keywords: Human Development Index, Foreign Direct Investment, Labor Force Participation Rate, population, poverty, panel data.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan fundamental dalam pembangunan ekonomi yang bersifat kompleks dan multidimensi. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencakup ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Menurut Rahman et al. (2019), kemiskinan bersifat multidimensi karena berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, politik, sosial budaya, serta partisipasi dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari faktor struktural dan sistemik yang membentuk kondisi kehidupan masyarakat.

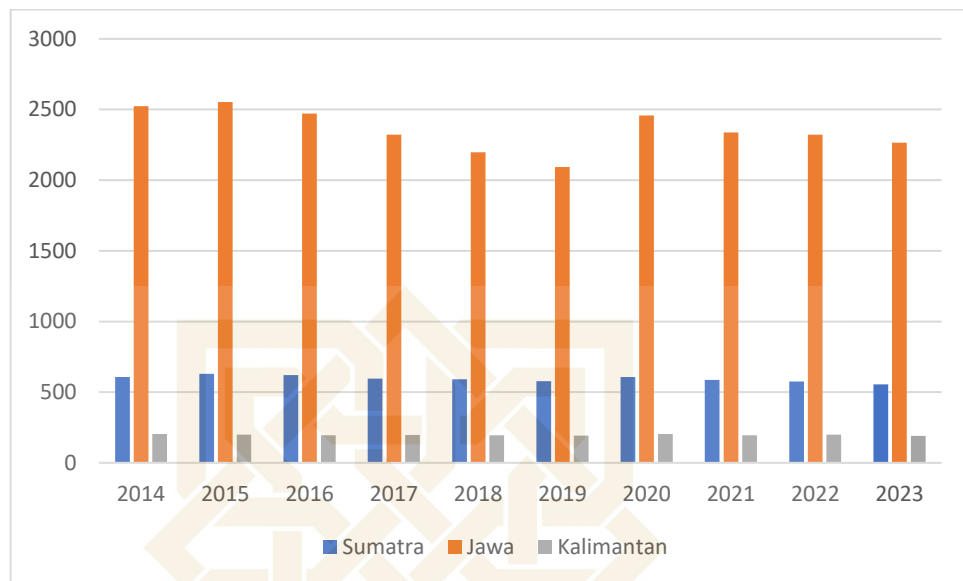
Selain itu, kemiskinan juga sering bersifat struktural. Rarasati (2007) menjelaskan bahwa kemiskinan struktural muncul karena kelompok masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, termasuk modal dan kredit, sehingga mereka tidak mampu meningkatkan kesejahteraan meskipun terdapat peluang pembangunan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah struktural yang dihadapi oleh hampir semua negara berkembang, termasuk Indonesia. Secara makroekonomi, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga oleh ketidakseimbangan dalam pembangunan, keterbatasan

kesempatan kerja, serta kualitas sumber daya manusia yang belum optimal. Untuk memahami kemiskinan secara lebih komprehensif, dapat dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu dari sisi investasi asing atau penanaman modal asing (PMA), dari sisi ketenagakerjaan melalui tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan dari sisi kesejahteraan masyarakat melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Ketiga indikator tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana perekonomian suatu wilayah dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian ini memiliki sejumlah kebaruan yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu. Kebaruan pertama terletak pada pendekatan analisis yang lebih komprehensif dalam menjelaskan kemiskinan, di mana penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu atau dua variabel sebagaimana dilakukan penelitian sebelumnya, tetapi mengintegrasikan Indeks Pembangunan Manusia, Penanaman Modal Asing, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara simultan dalam satu model regresi panel. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, investasi, dan struktur tenaga kerja (Todaro & Smith, 2015). Kebaruan kedua yaitu penempatan jumlah penduduk sebagai variabel kontrol, bukan sebagai variabel utama. Penempatan variabel ini bertujuan mengendalikan pengaruh faktor demografis sehingga estimasi pengaruh IPM, PMA, dan TPAK terhadap kemiskinan menjadi

lebih akurat dan bebas bias, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian ekonomi pembangunan modern (Gujarati & Porter, 2009)

Kebaruan ketiga terletak pada fokus wilayah penelitian yang secara khusus menyoroti Pulau Jawa. Pulau ini merupakan pusat ekonomi nasional dengan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia dan penerima PMA terbesar, namun pada saat yang sama tetap menyumbang jumlah penduduk miskin yang besar dan menunjukkan disparitas kesejahteraan antarwilayah (BPS, 2024). Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada skala nasional atau provinsi secara umum tanpa memberikan perhatian khusus pada karakteristik geografis dan struktural Pulau Jawa. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru secara kontekstual melalui analisis mendalam mengenai faktor-faktor penentu kemiskinan di wilayah yang secara ekonomi maju namun masih menghadapi tantangan kemiskinan regional (BPS, 2024; Suryahadi et al., 2012). Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan dari sisi fokus kajian, pendekatan variabel, serta landasan metodologis yang digunakan.



Gambar 1. 1 Tiga Pulau dengan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2014-2023
(Ribuan)

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional 2024

Berdasarkan gambar 1. 1 data kemiskinan menurut pulau dari tahun 2014 hingga 2023, terlihat bahwa Pulau Jawa secara konsisten memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi dibandingkan dengan pulau lainnya. Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Jawa mencapai 2.523,962 ribu jiwa dan terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun sempat menurun hingga 2.092,65 ribu jiwa pada tahun 2019, angka tersebut kembali meningkat menjadi 2.458,673 ribu jiwa pada tahun 2020, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Setelah itu, jumlah penduduk miskin di Jawa perlahan menurun lagi hingga mencapai 2.265,548 ribu jiwa pada tahun 2023.

Sementara itu, Pulau Sumatra menempati urutan kedua dengan jumlah penduduk miskin yang juga cukup besar namun jauh lebih rendah dibandingkan Jawa. Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Sumatra

tercatat 607,042 ribu jiwa dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 577,241 ribu jiwa. Meski pada tahun 2020 sempat naik menjadi 606,619 ribu jiwa, tren berikutnya menunjukkan penurunan yang cukup konsisten hingga mencapai 555,907 ribu jiwa pada tahun 2023.

Pulau Kalimantan memiliki jumlah penduduk miskin terendah di antara ketiganya. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 203,252 ribu jiwa dan mengalami penurunan relatif stabil dari tahun ke tahun. Walaupun sempat meningkat sedikit pada tahun 2021 menjadi 195,082 ribu jiwa, secara umum jumlah penduduk miskin di Kalimantan menunjukkan tren penurunan hingga mencapai 190,676 ribu jiwa pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Pulau Jawa menjadi wilayah dengan beban kemiskinan terbesar di Indonesia sepanjang periode 2014–2023, diikuti oleh Sumatra dan Kalimantan. Meskipun terjadi fluktuasi, tren umum dari ketiga pulau menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin, menandakan perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.

Pulau Jawa merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia selama periode 2014–2023. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai angka yang jauh lebih besar dibandingkan pulau-pulau lain seperti Sumatra dan Kalimantan. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 2.523,962 ribu jiwa, dan meskipun sempat mengalami penurunan hingga 2.092,65 ribu jiwa pada tahun 2019, angka tersebut kembali meningkat pada masa pandemi tahun 2020 sebesar

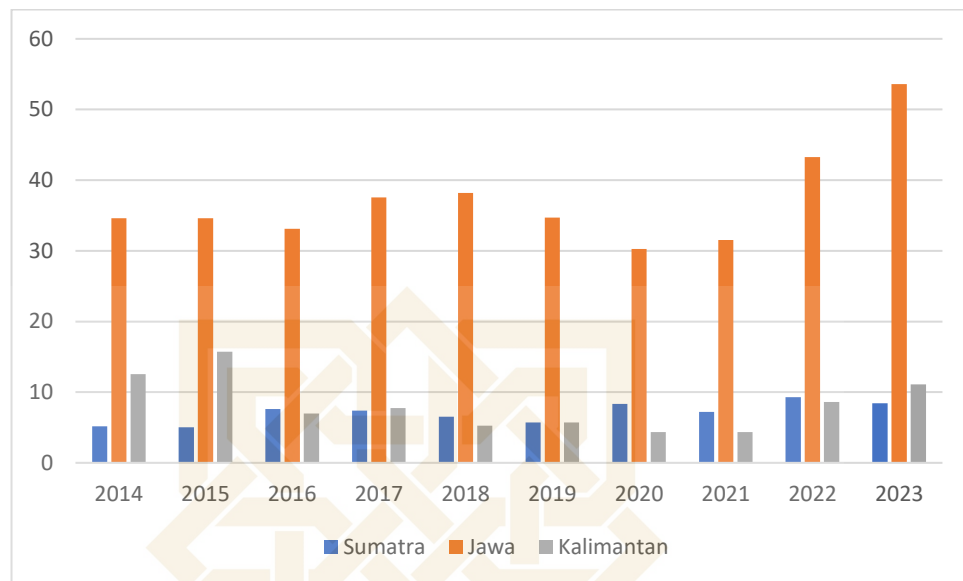
2.458,673 ribu jiwa. Kondisi ini menggambarkan bahwa Pulau Jawa masih menghadapi tantangan besar dalam menekan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan, meskipun menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah dengan infrastruktur paling maju di Indonesia.

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena adanya paradoks antara tingkat pembangunan ekonomi dan masih tingginya angka kemiskinan di Pulau Jawa. Sebagai pusat industri, perdagangan, dan pemerintahan, seharusnya Pulau Jawa memiliki kemampuan lebih besar dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan wilayah lain. Namun, ketimpangan distribusi pendapatan, urbanisasi yang tinggi, serta tingginya tingkat pengangguran terselubung justru memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat (Suryahadi & Sumarto, 2020). Selain itu, laju pertumbuhan penduduk yang cepat juga menambah tekanan terhadap lapangan pekerjaan dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat (Tambunan, 2019).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Pulau Jawa, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk menurunkan angka kemiskinan. Penelitian ini juga penting sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas program pembangunan manusia, penyerapan tenaga kerja, serta distribusi investasi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan di wilayah paling padat penduduknya di Indonesia tersebut.

Dari perspektif makroekonomi, penanaman modal asing (PMA) berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. PMA berfungsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, terutama ketika kapasitas investasi domestik terbatas. Investasi asing dapat mendorong peningkatan produktivitas, memperkenalkan teknologi baru, serta memperluas pasar tenaga kerja. Penelitian oleh Sari dan Utami (2021) menunjukkan bahwa peningkatan PMA sebesar 1% dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0,25% di Indonesia karena efek berganda yang dihasilkan terhadap lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

Selain itu, Yuliani dan Saputra (2020) menemukan bahwa pengaruh PMA terhadap kemiskinan bersifat tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja. Daerah dengan realisasi PMA yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah karena investasi tersebut meningkatkan aktivitas industri dan jasa modern yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh karena itu, PMA dapat dianggap sebagai instrumen kebijakan yang strategis dalam mengentaskan kemiskinan, selama pemerintah mampu memastikan pemerataan distribusi manfaatnya di berbagai daerah.



Gambar 1. 2 Nilai Penanaman Modal Asing Pada Pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan (Triliun)

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional 2024

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta penguatan struktur industri. Perkembangan PMA di Indonesia selama satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah maupun distribusi antar wilayah. Namun demikian, distribusi PMA antar pulau masih menunjukkan ketimpangan yang cukup nyata, di mana Pulau Jawa masih menjadi tujuan utama investasi asing dibandingkan Sumatra dan Kalimantan.

Berdasarkan data PMA tahun 2014–2023 dalam satuan triliun rupiah, terlihat bahwa Pulau Jawa secara konsisten menjadi wilayah dengan realisasi PMA tertinggi. Pada awal periode, yaitu tahun 2014–2015, PMA

di Jawa berada pada kisaran 34,60 triliun rupiah, relatif stabil dibandingkan pulau lainnya. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 33,12 triliun rupiah dan kembali berfluktuasi hingga tahun 2019, Jawa tetap mempertahankan dominasinya sebagai pusat investasi asing. Dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan PMA Jawa mengalami kontraksi cukup dalam hingga turun menjadi 30,26 triliun rupiah. Namun, pasca-pandemi, PMA kembali menunjukkan pemulihan yang sangat kuat, yaitu meningkat menjadi 31,55 triliun rupiah pada 2021, melonjak menjadi 43,26 triliun rupiah pada 2022, dan mencapai puncaknya pada 53,61 triliun rupiah pada 2023. Kondisi ini mencerminkan bahwa Jawa masih memiliki daya tarik investasi yang sangat tinggi, didukung oleh ketersediaan infrastruktur, pasar yang besar, dan iklim usaha yang relatif lebih kondusif.

Sementara itu, PMA di Pulau Sumatra menunjukkan pola yang cenderung fluktuatif namun memiliki kecenderungan meningkat dalam jangka panjang. Pada periode 2014–2015, PMA Sumatra berada pada kisaran 5,17–5,02 triliun rupiah. Nilai ini kemudian meningkat cukup signifikan pada 2016–2017 hingga mencapai lebih dari 7 triliun rupiah, sebelum kembali mengalami penurunan pada 2018–2019. Menariknya, pada masa pandemi tahun 2020, PMA Sumatra justru mengalami lonjakan menjadi 8,32 triliun rupiah, meskipun kembali menurun pada 2021. Puncak PMA Sumatra terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 9,30 triliun rupiah, sebelum sedikit menurun menjadi 8,41 triliun rupiah pada 2023.

Tren ini mengindikasikan bahwa Sumatra mulai semakin diminati investor asing, terutama pada sektor perkebunan, pertambangan, dan industri berbasis sumber daya alam.

Adapun PMA di Pulau Kalimantan menunjukkan fluktuasi yang relatif lebih tajam dibandingkan dua pulau lainnya. Pada tahun 2014–2015, PMA Kalimantan tergolong tinggi, bahkan mencapai 15,72 triliun rupiah pada 2015. Namun, setelah itu terjadi penurunan yang cukup signifikan pada periode 2016–2019 hingga berada pada kisaran 5–7 triliun rupiah. Kondisi tersebut semakin melemah pada masa pandemi 2020–2021, di mana PMA Kalimantan berada pada titik terendah yaitu sekitar 4,36 triliun rupiah. Akan tetapi, pada tahun 2022–2023, PMA Kalimantan kembali meningkat secara signifikan hingga mencapai 11,08 triliun rupiah pada 2023. Peningkatan ini tidak terlepas dari mulai masifnya pembangunan infrastruktur strategis, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), serta tingginya investasi di sektor energi dan pertambangan.

Secara keseluruhan, data PMA tahun 2014–2023 menunjukkan bahwa distribusi investasi asing di Indonesia masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara Sumatra dan Kalimantan meskipun mengalami peningkatan, belum mampu mengejar dominasi Jawa. Ketimpangan distribusi investasi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan pembangunan antar wilayah, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, maupun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana peran PMA dalam mendorong pembangunan

ekonomi regional, khususnya kaitannya dengan permasalahan kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, dan penyerapan tenaga kerja.

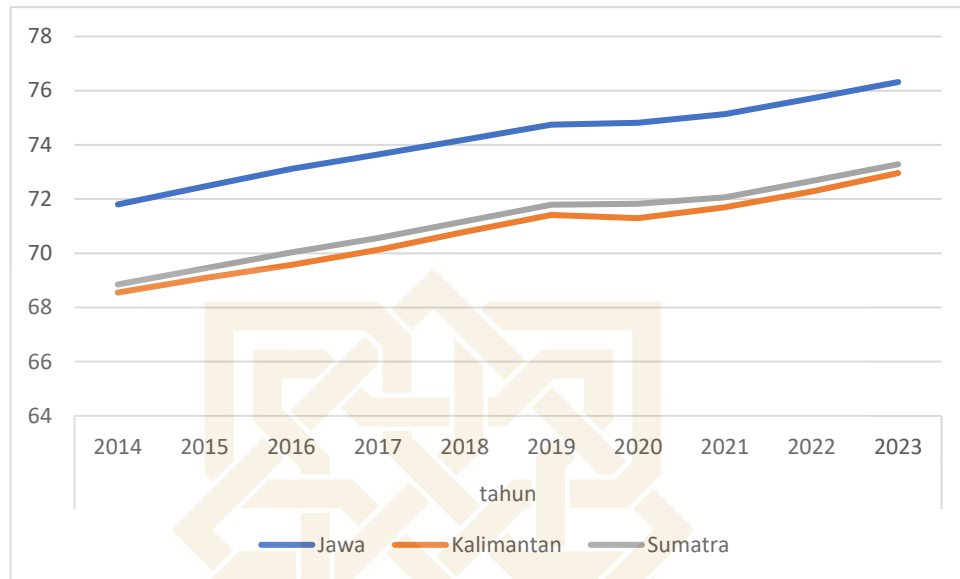
Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap kemiskinan menjadi sangat relevan untuk dilakukan, khususnya dengan membandingkan dinamika PMA antar pulau di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemerataan investasi yang lebih efektif guna mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kemiskinan juga dapat dilihat dari sisi pasar tenaga kerja melalui indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK menggambarkan sejauh mana penduduk usia kerja berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin banyak penduduk yang produktif dan memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian oleh Hidayat dan Puspitasari (2022) menunjukkan bahwa kenaikan TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, di mana peningkatan 1% TPAK menurunkan kemiskinan sebesar.

Namun, peningkatan TPAK tidak selalu menjamin penurunan kemiskinan apabila kesempatan kerja yang tersedia masih didominasi sektor informal dengan upah rendah. Suharto dan Prasetyo (2022) menegaskan bahwa hubungan antara TPAK dan kemiskinan bersifat kompleks karena

tergantung pada kualitas pekerjaan yang diciptakan. Ketika lapangan kerja baru berkualitas rendah, partisipasi kerja yang meningkat justru dapat memperluas kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Oleh sebab itu, peningkatan TPAK perlu diiringi dengan kebijakan peningkatan produktivitas tenaga kerja agar berkontribusi signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

Dari sisi kesejahteraan, kemiskinan berkaitan erat dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dari tiga aspek utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi IPM menunjukkan semakin baik kualitas hidup masyarakat, yang berimplikasi pada menurunnya kemiskinan. Penelitian oleh Putri dan Hasanah (2023) membuktikan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, di mana peningkatan IPM sebesar 1 poin mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,32%.



Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia dari Pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan (Indeks)

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional 2024

Berdasarkan gambar 1. 3 data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut pulau dari tahun 2014 hingga 2023, Pulau Jawa secara konsisten mencatat nilai IPM tertinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Pada tahun 2014, IPM Pulau Jawa tercatat sebesar 71,80, kemudian terus meningkat secara stabil hingga mencapai 76,31 pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat di Pulau Jawa. Peningkatan IPM ini juga menggambarkan keberhasilan pembangunan manusia di wilayah dengan tingkat urbanisasi dan aktivitas ekonomi tertinggi di Indonesia.

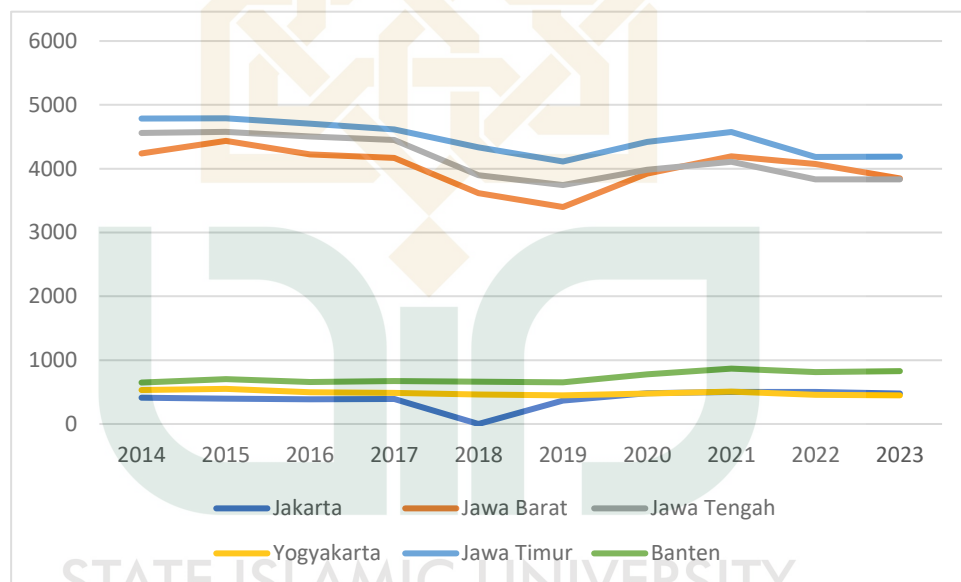
Sementara itu, Pulau Sumatra menempati urutan kedua dengan nilai IPM yang juga menunjukkan tren positif dari 68,85 pada tahun 2014 menjadi 73,28 pada tahun 2023. Kenaikan yang terjadi cukup stabil,

menandakan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut, meskipun masih tertinggal dibandingkan Pulau Jawa. Adapun Pulau Kalimantan juga menunjukkan perkembangan IPM yang konsisten, meningkat dari 68,55 pada tahun 2014 menjadi 72,96 pada tahun 2023. Namun, laju peningkatannya masih relatif lebih lambat dibandingkan dua pulau lainnya.

Secara umum, peningkatan IPM di ketiga pulau ini menunjukkan adanya kemajuan pembangunan manusia di Indonesia selama satu dekade terakhir. Namun, dominasi Pulau Jawa dengan nilai IPM tertinggi memperlihatkan adanya ketimpangan antarwilayah yang masih nyata. Kondisi ini menjadi alasan kuat mengapa penelitian difokuskan pada Pulau Jawa. Meskipun Pulau Jawa memiliki IPM tertinggi, wilayah ini juga memiliki jumlah penduduk miskin dan ketimpangan sosial yang lebih besar dibandingkan pulau lainnya. Fenomena paradoks ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana peningkatan IPM benar-benar berdampak pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di wilayah tersebut.

Dengan demikian, penelitian mengenai hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa menjadi penting dilakukan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui apakah peningkatan IPM di Jawa sejalan dengan penurunan kemiskinan atau justru terdapat faktor struktural lain yang menghambat pemerataan hasil pembangunan.

Selain itu, Kusnadi dan Rahmawati (2022) menekankan bahwa aspek pendidikan dalam IPM memiliki pengaruh paling kuat terhadap penurunan kemiskinan, karena pendidikan meningkatkan kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih produktif dan berpenghasilan tinggi. Dengan demikian, peningkatan IPM dapat memperkuat daya saing tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial yang menjadi akar dari kemiskinan.



Gambar 1. 4 Jumlah Kemiskinan di Pulau Jawa (Ribuan Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistika Nasional 2025

Pada gambar 1. 4 menunjukkan bahwa selama periode 2014 hingga 2018, tingkat kemiskinan di enam provinsi di Pulau Jawa secara umum menunjukkan tren penurunan. DKI Jakarta sebagai ibu kota konsisten mencatat jumlah penduduk miskin yang relatif rendah, turun dari sekitar 412 ribu orang pada 2014 menjadi 373 ribu orang pada 2018. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar

juga mengalami penurunan cukup signifikan, meskipun angka absolut kemiskinan di ketiga daerah tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Yogyakarta dan Banten turut memperlihatkan penurunan, meskipun Banten sempat mengalami fluktuasi pada 2015. Secara keseluruhan, periode ini menggambarkan adanya perbaikan kondisi sosial-ekonomi serta keberhasilan awal program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.

Memasuki 2019, kondisi kemiskinan relatif stabil dengan tren penurunan yang masih berlanjut meskipun laju perbaikannya mulai melambat. Hal ini wajar terjadi karena setelah kemiskinan ekstrem berkurang, upaya penurunan berikutnya cenderung lebih sulit dicapai, terutama di daerah dengan jumlah penduduk besar dan keragaman sosial ekonomi yang kompleks.

Tahun 2020 menjadi titik balik yang cukup berat karena pandemi COVID-19 memicu peningkatan angka kemiskinan di seluruh provinsi. Pembatasan sosial berskala besar, penurunan aktivitas ekonomi, serta banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan menyebabkan lonjakan penduduk miskin, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jakarta dan Banten juga merasakan dampak signifikan, terutama dari kontraksi sektor jasa, perdagangan, dan industri.

Pada periode 2021 hingga 2023, kondisi perlahan membaik seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Program bantuan sosial, dukungan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta berbagai stimulus

pemulihan ekonomi membantu menekan kembali angka kemiskinan. Meskipun penurunan tersebut belum sepenuhnya mengembalikan kondisi ke tingkat pra-pandemi, tren yang muncul cukup positif. Jakarta menunjukkan pemulihan yang stabil, sementara provinsi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur mulai berhasil menurunkan kembali jumlah penduduk miskin. Yogyakarta dan Banten juga mengalami perbaikan meskipun dengan laju yang relatif lebih lambat. Secara umum, periode 2014–2023 menggambarkan perjalanan panjang pengentasan kemiskinan di Pulau Jawa, dengan fase penurunan stabil, gangguan akibat pandemi, dan pemulihan bertahap di tahun-tahun berikutnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya kemiskinan yaitu tingkat kesejahteraan yang bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan kualitas pembangunan manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Sebuah studi yang menganalisis data nasional periode 2013–2022 menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya, ketika IPM meningkat melalui perbaikan indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, maka jumlah penduduk miskin mengalami penurunan secara konsisten (The Development of Human and Poverty in Indonesia, 2023). Hal ini menegaskan pentingnya pembangunan manusia sebagai strategi pengentasan kemiskinan jangka panjang.

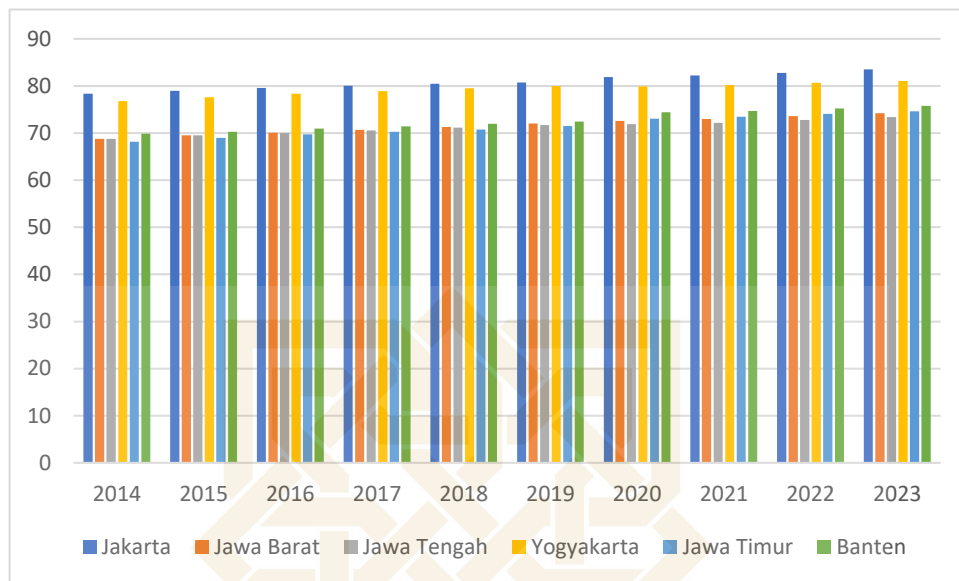
Penelitian lain pada tingkat provinsi juga memperkuat temuan tersebut. Analisis panel di berbagai wilayah Indonesia menemukan bahwa peningkatan IPM di suatu provinsi berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Bahkan, meskipun terdapat variasi antarprovinsi karena faktor struktur ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja, hasil penelitian tetap menunjukkan bahwa IPM secara parsial maupun simultan berkontribusi signifikan dalam menekan kemiskinan (Darma, Muslihatinningsih, & Adenan, 2024). Dengan demikian, IPM dapat dipandang sebagai salah satu variabel kunci dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

Selain itu, studi di berbagai kawasan juga menegaskan peran penting IPM dalam menurunkan kemiskinan. Penelitian di Kalimantan, misalnya, menemukan bahwa kenaikan IPM berdampak nyata terhadap berkurangnya tingkat kemiskinan, walaupun diperlukan dukungan pembangunan infrastruktur agar hasilnya lebih berkelanjutan (Heriyansyah, 2024). Penelitian di kawasan lain seperti Madura dan Nusa Tenggara Timur pun menunjukkan pola serupa, di mana peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat melalui IPM terbukti berasosiasi dengan turunnya tingkat kemiskinan (Wulandari & Prasasti, 2024).

Lebih jauh, beberapa penelitian mencoba memisahkan pengaruh tiap komponen IPM terhadap kemiskinan. Hasilnya, indikator pendidikan seperti rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah memiliki

kontribusi paling besar dalam menekan kemiskinan, diikuti oleh indikator standar hidup yang tercermin dari pengeluaran per kapita. Sementara itu, indikator kesehatan juga berperan penting, meskipun efeknya lebih terlihat dalam jangka menengah hingga panjang (Nurcholifah, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga langsung berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan konsistensi temuan bahwa IPM berperan penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Peningkatan akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, serta peningkatan daya beli masyarakat melalui perbaikan IPM menjadi strategi fundamental dalam pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan (Apriyanti & Rospida, 2024). Oleh karena itu, penguatan IPM dapat dipandang bukan hanya sebagai indikator pembangunan, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan strategis dalam menekan tingkat kemiskinan.



Gambar 1. 5 IPM di Pulau Jawa (Indeks)

Sumber: Badan Pusat Statistika Nasional 2025

Pada gambar 1. 5 tahun 2014 capaian IPM di Pulau Jawa menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup jelas antarprovinsi. DKI Jakarta mencatat IPM tertinggi, mendekati angka 79, disusul DI Yogyakarta yang juga sudah berada di level 77–78. Sementara itu, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masih berada pada kategori menengah, dengan kisaran 67–69. Banten mencatat IPM sekitar 69–70, sedikit lebih tinggi dibanding Jawa Tengah, tetapi masih cukup jauh tertinggal dari Jakarta dan DIY. Gambaran ini menunjukkan bahwa awal periode pengamatan, kualitas pembangunan manusia di Pulau Jawa masih sangat bervariasi.

Pada 2015, tren peningkatan IPM mulai terlihat di seluruh provinsi. Jakarta dan DIY tetap menjadi dua daerah dengan capaian tertinggi, bahkan semakin mendekati kategori sangat tinggi. Sementara itu, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menunjukkan perbaikan, meskipun kenaikannya

masih terbatas pada kisaran 0,3–0,4 poin. Banten pun mulai menunjukkan tren positif, terutama di wilayah perkotaan yang mendorong kenaikan rata-rata provinsi. Memasuki 2016, peningkatan IPM lebih merata. DKI Jakarta berhasil mendekati angka 80, sementara DIY terus menguat dengan capaian sekitar 78–79. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masih pada posisi menengah, namun perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan mulai terlihat dari kenaikan yang stabil. Disparitas antarwilayah dalam satu provinsi masih cukup besar, terutama di Banten dan Jawa Barat. Pada 2017, seluruh provinsi di Jawa mencatatkan tren positif. Jakarta berhasil mencapai IPM di atas 80, menandai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. DIY juga semakin mendekati angka tersebut. Sementara itu, provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten terus mengalami peningkatan, rata-rata sudah mencapai 70–71. Hal ini menunjukkan upaya pembangunan manusia mulai terasa hasilnya.

Tahun 2018 menjadi periode yang mempertegas gap antara kelompok provinsi dengan IPM tinggi (DKI dan DIY) dengan provinsi lain yang masih berproses menuju level lebih tinggi. Jakarta dan Yogyakarta semakin kokoh di atas 80 dan 79, sementara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten sudah mulai masuk ke kisaran 71–72. Meskipun demikian, ketimpangan antarwilayah dalam satu provinsi tetap menjadi tantangan. Pada 2019, seluruh provinsi di Jawa mencatatkan kenaikan IPM yang relatif konsisten. DKI Jakarta menguat di atas 81, sementara DIY juga mulai menembus angka 80. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur

menunjukkan capaian sekitar 72, sedangkan Banten sedikit lebih tinggi dari rata-rata tersebut. Tahun ini menjadi titik penting karena seluruh provinsi menunjukkan konsistensi dalam peningkatan pembangunan manusia.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada pembangunan manusia. Pada 2020, meskipun IPM tetap meningkat, laju kenaikannya melambat di semua provinsi. Jakarta dan DIY masih tetap unggul di atas 80, namun kenaikan relatif tipis dibanding tahun sebelumnya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten tetap berada di sekitar 72–73, menunjukkan bahwa pandemi menekan capaian pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

Pada 2021, tren pemulihan mulai terlihat. Jakarta berhasil menjaga IPM di atas 81, sementara DIY juga meningkat lebih stabil hingga mendekati 81. Provinsi lain, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, kembali menunjukkan kenaikan meskipun bertahap, berada pada kisaran 73. Hal ini menandakan mulai pulihnya layanan pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi setelah pandemi. Tahun 2022 mencatatkan pemulihan yang lebih kuat. Jakarta terus menanjak di atas 82, menjadikannya provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. DIY menyusul dengan capaian sekitar 81. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten juga semakin stabil di kisaran 73–74. Meskipun kesenjangan masih ada, tren ini menegaskan bahwa Pulau Jawa bergerak menuju peningkatan kualitas pembangunan manusia yang lebih merata.

Pada 2023, IPM di enam provinsi Pulau Jawa mencapai titik tertinggi sepanjang periode pengamatan. Jakarta dan DIY sama-sama menembus angka 81–82, menempatkan keduanya dalam kategori sangat tinggi. Sementara itu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten berhasil memperbaiki capaian hingga 74–75. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun masih ada perbedaan antarprovinsi, secara keseluruhan Pulau Jawa telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan manusia selama 2014–2023.

Selain Indeks Pembangunan Manusia salah satu instrumen penting yang diyakini dapat membantu pengentasan kemiskinan yaitu dari segi makroekonomi yang bisa dilihat dari Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment* (FDI). Arus FDI tidak hanya meningkatkan stok modal dalam negeri, tetapi juga membawa teknologi baru, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing. Dengan demikian, masuknya FDI berpotensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menurunkan angka kemiskinan.

Studi regional menunjukkan bukti nyata hubungan positif antara FDI dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Prawoto (2024), dengan menggunakan data panel dari 20 provinsi di Indonesia pada periode 2012–2022, menemukan bahwa arus FDI berpengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, terutama dalam jangka panjang. Mekanisme yang ditemukan adalah melalui jalur investasi produktif dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa

semakin besar aliran investasi asing yang masuk ke suatu daerah, semakin berkurang jumlah penduduk miskin.

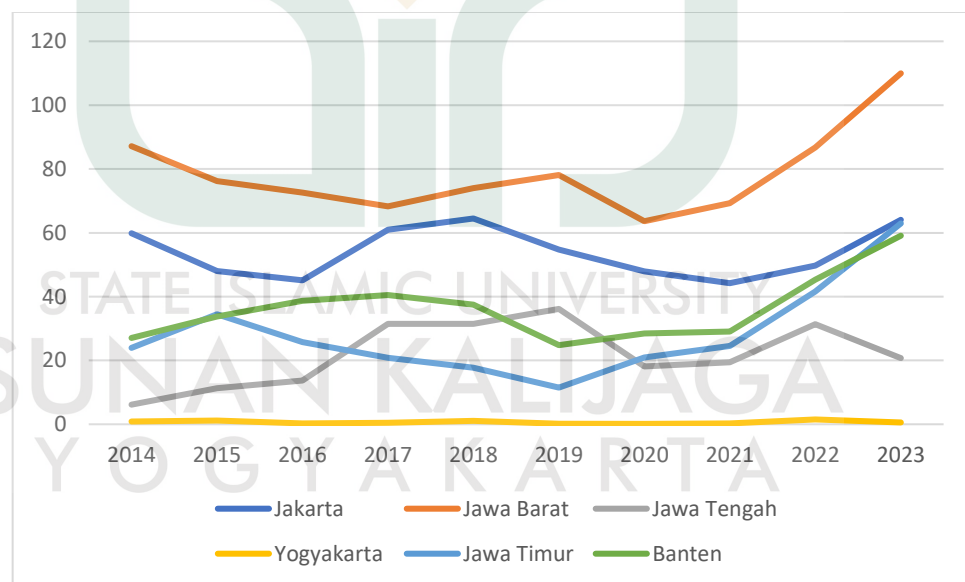
Temuan serupa juga terlihat pada studi lintas negara di kawasan ASEAN. Azaria dan Sihalo (2021) menganalisis data panel dari lima negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam) selama periode 1990–2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDI memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kawasan tersebut. Selain itu, faktor pendukung seperti perkembangan sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan juga memainkan peran penting dalam memperkuat dampak FDI.

Khusus di Vietnam, penelitian Do et al. (2021) menemukan bahwa arus FDI berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan kemiskinan. Secara langsung, FDI membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sementara secara tidak langsung mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan modal manusia di wilayah penerima investasi. Namun, penelitian ini juga mencatat adanya sisi lain dari FDI, yakni potensi memperparah kemiskinan di daerah dengan keterbukaan perdagangan yang sangat tinggi.

Dalam konteks Indonesia, studi oleh Goh et al. (2024) menambahkan dimensi penting lain yaitu peran kualitas institusi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa FDI dapat membantu menurunkan kemiskinan apabila didampingi dengan pengembangan modal manusia dan tata kelola institusi yang baik. Sebaliknya, apabila kualitas institusi rendah,

arus FDI tidak mampu berkontribusi optimal pada pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa investasi asing sering kali terkonsentrasi di daerah-daerah dengan infrastruktur lebih baik dan birokrasi yang lebih mendukung.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa FDI memiliki peran penting dalam menurunkan kemiskinan di Indonesia maupun kawasan ASEAN. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada faktor pendukung lain, seperti pendidikan, modal manusia, sistem keuangan, infrastruktur, dan kualitas institusi. Dengan demikian, penelitian mengenai pengaruh FDI terhadap kemiskinan masih relevan dilakukan, terutama dengan fokus pada konteks Indonesia, agar diperoleh bukti empiris yang lebih spesifik terkait efektivitas PMA dalam membantu pengentasan kemiskinan di dalam negeri.



Gambar 1. 6 PMA di Pulau Jawa (Triliun)

Sumber: Badan Pusat Statistika Nasional 2025

Berdasarkan gambar 1. 6 enam provinsi Pulau Jawa pada periode 2014–2023, terlihat bahwa Jawa Barat secara konsisten menjadi provinsi dengan nilai investasi tertinggi. Rata-rata nilai PMA Jawa Barat selalu mendominasi dengan tren peningkatan signifikan, terutama setelah tahun 2021, hingga mencapai lebih dari Rp120 triliun pada 2023. Dominasi ini tidak terlepas dari kuatnya basis industri manufaktur, infrastruktur yang memadai, serta lokasi strategis yang berdekatan dengan DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional.

DKI Jakarta menempati posisi kedua dengan nilai investasi yang relatif fluktuatif. Setelah mencatat lebih dari Rp68 triliun pada 2014, investasi sempat mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19, namun kembali pulih pada 2023 dengan mencapai Rp73 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta tetap menjadi pusat investasi asing, meskipun sebagian investor mulai mengalihkan modal ke provinsi lain yang memiliki potensi pertumbuhan lebih besar.

Jawa Timur memperlihatkan perkembangan yang cukup dinamis. Pada awal periode, nilai investasi berada pada kisaran Rp27–39 triliun, namun sempat menurun di 2018–2019. Pemulihan mulai terlihat pada 2020, dan tren peningkatan terus berlanjut hingga melonjak tajam pada 2022–2023, dengan nilai investasi mencapai Rp72 triliun. Pertumbuhan ini menegaskan peran Jawa Timur sebagai pusat industri dan perdagangan di kawasan timur Pulau Jawa.

Provinsi Banten juga menunjukkan tren positif, terutama setelah tahun 2020. Meskipun pada 2018–2019 nilai PMA sempat menurun, pemulihan terjadi dengan cepat, sehingga pada 2022–2023 nilai investasi meningkat tajam hingga mencapai Rp67,7 triliun. Kenaikan ini berkaitan erat dengan berkembangnya kawasan industri di wilayah Tangerang dan Cilegon yang semakin menarik minat investor asing.

Sementara itu, Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Setelah mencatat peningkatan signifikan pada periode 2017–2019 dengan nilai investasi di atas Rp35 triliun, penurunan kembali terjadi setelah pandemi, dan pada 2023 hanya mencatat sekitar Rp23,8 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Jawa Tengah mulai menjadi alternatif tujuan investasi asing, daya tariknya masih kalah kuat dibanding Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Timur.

Adapun DI Yogyakarta selalu mencatat nilai PMA terendah di Pulau Jawa sepanjang periode pengamatan. Investasi asing di provinsi ini hanya berkisar ratusan miliar hingga sekitar Rp1–1,7 triliun, dengan fluktuasi yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan keterbatasan basis industri di Yogyakarta, di mana PMA lebih banyak berfokus pada sektor pariwisata, pendidikan, dan jasa kreatif.

Secara keseluruhan, tren PMA di Pulau Jawa menunjukkan peningkatan signifikan pada periode pasca-pandemi, khususnya pada tahun 2022 dan 2023. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur masih menjadi magnet utama bagi investor asing, sementara Banten mulai menunjukkan

perkembangan pesat. Sebaliknya, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta memiliki potensi pertumbuhan, tetapi nilai investasi yang masuk masih relatif terbatas.

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk di berbagai provinsi di Pulau Jawa. Salah satu faktor yang banyak dikaji dalam hubungannya dengan kemiskinan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Secara teoritis, peningkatan partisipasi kerja akan memperbesar peluang masyarakat untuk memperoleh pendapatan, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian regional di Aceh yang dilakukan oleh Yurina & Mislal (2024) menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu daerah, semakin besar peluang penurunan kemiskinan. Temuan ini menegaskan bahwa ketersediaan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja produktif dapat menjadi faktor kunci dalam menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Penelitian lain yang dilakukan di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara oleh Pasaribu, Batubara, & Rahmani (2023) juga menemukan bahwa jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, meningkatnya penyerapan tenaga kerja berkontribusi pada penurunan kemiskinan, khususnya di tingkat daerah. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja

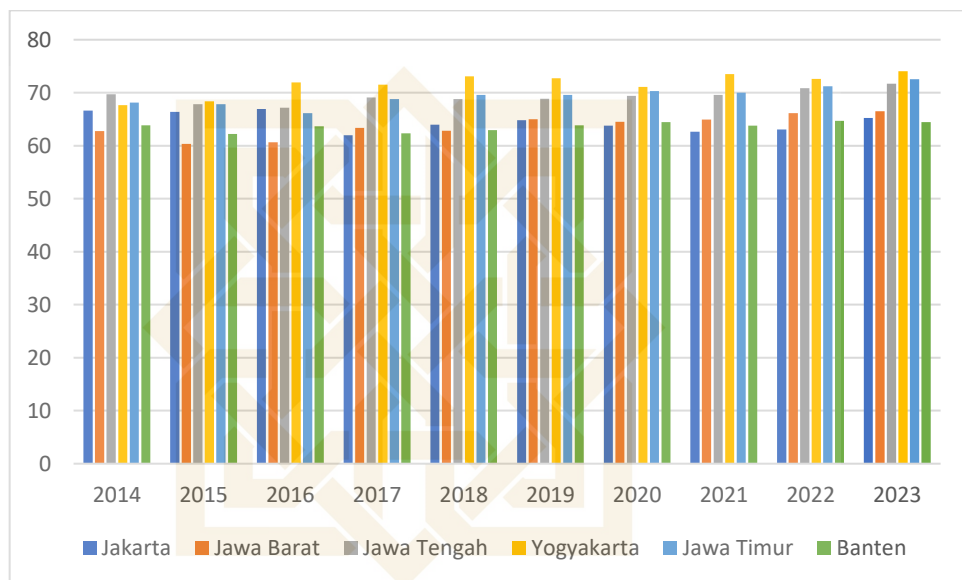
tidak hanya penting di tingkat nasional, tetapi juga memiliki dampak nyata di tingkat kabupaten/kota.

Selain dari itu, Delviera & Amar (2024) melalui penelitian panel data pada 34 provinsi di Indonesia periode 2018–2022 menemukan bahwa TPAK secara signifikan berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa variabel lain seperti upah minimum tidak berpengaruh signifikan. Hasil tersebut memperkuat pemahaman bahwa kualitas penyerapan tenaga kerja jauh lebih penting dibanding sekadar peningkatan nominal upah minimum, sehingga peningkatan partisipasi angkatan kerja harus menjadi prioritas dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.

Dalam analisis jangka panjang menggunakan model ARDL, Mutaqqin & Anwar (2024) juga menemukan bahwa TPAK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya, peningkatan partisipasi angkatan kerja mampu memberikan efek langsung dalam mengurangi kemiskinan, sekaligus memperlihatkan dampak berkelanjutan jika diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat dipahami bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya menurunkan kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun regional. Namun, perbedaan kondisi ekonomi dan struktur tenaga kerja antarprovinsi menunjukkan bahwa pengaruh TPAK terhadap

kemiskinan bisa bervariasi, sehingga penting untuk melakukan kajian lebih mendalam pada level provinsi, khususnya di Pulau Jawa yang menjadi pusat perekonomian Indonesia.



Gambar 1. 7 TPAK di Pulau Jawa (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistika Nasional 2025

Pada gambar 1. 7 Perkembangan TPAK di DKI Jakarta selama 2014–2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. Pada tahun 2014, angka partisipasi angkatan kerja tercatat sebesar 66,61 persen, sedikit menurun menjadi 66,39 persen pada 2015. Kenaikan kembali terjadi pada 2016 dengan capaian 66,91 persen, namun kemudian merosot tajam pada 2017 menjadi 61,97 persen. Setelah itu, tren perbaikan terjadi dengan angka yang relatif stabil, yaitu 63,95 persen pada 2018, 64,81 persen pada 2019, dan sedikit turun pada 2020 sebesar 63,81 persen. Selama masa pandemi, TPAK terus mengalami tekanan, hingga pada 2021 tercatat 62,63 persen. Namun, pemulihan mulai terlihat pada 2022 sebesar 63,08 persen, dan

meningkat lagi pada 2023 mencapai 65,21 persen. Pergerakan ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Jakarta sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi, tetapi memiliki daya pemulihan yang relatif cepat.

TPAK di Jawa Barat pada 2014 sebesar 62,77 persen, namun kemudian menurun drastis pada 2015 menjadi 60,34 persen. Kondisi ini sedikit membaik pada 2016 dengan 60,65 persen, lalu naik cukup signifikan pada 2017 mencapai 63,34 persen. Pada tahun 2018 angka ini turun tipis menjadi 62,84 persen, namun mengalami peningkatan berkelanjutan hingga 64,99 persen pada 2019. Selama pandemi 2020, partisipasi angkatan kerja sempat turun ke 64,53 persen, tetapi mulai meningkat kembali pada 2021 sebesar 64,95 persen dan 66,15 persen pada 2022. Tren positif ini berlanjut hingga 2023 dengan capaian tertinggi selama periode pengamatan, yaitu 66,49 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan kapasitas pasar tenaga kerja di Jawa Barat, terutama didukung oleh sektor industri dan manufaktur.

Provinsi Jawa Tengah secara umum mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja yang relatif stabil dalam periode 2014–2023. Pada tahun 2014, TPAK berada pada angka 69,68 persen, lalu menurun menjadi 67,86 persen pada 2015 dan 67,15 persen pada 2016. Kondisi ini kembali membaik pada 2017 sebesar 69,11 persen dan stabil di kisaran 68 persen pada 2018–2019. Pada 2020, TPAK naik tipis menjadi 69,43 persen, dan tetap stabil pada 2021 dengan 69,58 persen. Tren kenaikan semakin jelas terlihat pada 2022 dengan capaian 70,84 persen, dan berlanjut pada 2023 sebesar 71,72 persen. Konsistensi ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah

memiliki basis angkatan kerja yang relatif mapan, terutama dengan dukungan sektor pertanian, industri kecil, dan perdagangan.

TPAK di DI Yogyakarta cenderung berada pada level terendah di Pulau Jawa, namun menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2014, partisipasi angkatan kerja tercatat sebesar 67,65 persen, kemudian naik menjadi 68,38 persen pada 2015. Kenaikan besar terjadi pada 2016 hingga 71,96 persen, dan terus berlanjut pada 2017 sebesar 71,52 persen serta 73,12 persen pada 2018. Tahun 2019 mencatat 72,72 persen, sementara pada masa pandemi 2020 terjadi penurunan menjadi 71,12 persen. Meski demikian, pemulihan cepat terjadi pada 2021 dengan capaian 73,52 persen. Angka ini sedikit menurun pada 2022 menjadi 72,60 persen, lalu kembali meningkat pada 2023 hingga mencapai 74,08 persen, yang merupakan capaian tertinggi sepanjang periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata, jasa, dan pendidikan menjadi motor utama dalam mendukung peningkatan partisipasi kerja di Yogyakarta.

Jawa Timur mencatat perkembangan TPAK yang cukup stabil dengan tren meningkat. Pada 2014, partisipasi angkatan kerja sebesar 68,12 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 67,84 persen pada 2015 dan turun lagi pada 2016 menjadi 66,14 persen. Pemulihan mulai terlihat pada 2017 dengan capaian 68,78 persen dan meningkat menjadi 69,56 persen pada 2018. Tahun 2019 angka TPAK mencapai 69,61 persen, sebelum meningkat pada masa pandemi 2020 menjadi 70,33 persen. Pada 2021, TPAK relatif stabil sebesar 70,00 persen, kemudian naik ke 71,23 persen

pada 2022, dan mencapai 72,56 persen pada 2023. Stabilitas ini menunjukkan kuatnya fondasi pasar tenaga kerja di Jawa Timur yang didukung oleh sektor pertanian, industri, dan perdagangan besar.

Provinsi Banten memperlihatkan perkembangan TPAK yang relatif fluktuatif. Pada 2014, TPAK tercatat sebesar 63,84 persen, lalu menurun menjadi 62,24 persen pada 2015. Kenaikan terjadi pada 2016 sebesar 63,66 persen, tetapi turun kembali pada 2017 menjadi 62,32 persen. Tahun 2018 menunjukkan perbaikan ke angka 62,95 persen, dan berlanjut naik menjadi 63,83 persen pada 2019. Selama pandemi 2020, TPAK masih bertahan dengan capaian 64,48 persen, sedikit menurun pada 2021 menjadi 63,79 persen, lalu meningkat ke 64,72 persen pada 2022. Pada 2023, angka TPAK Banten sedikit menurun menjadi 64,44 persen. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika sektor industri dan jasa di Banten yang cukup terpengaruh oleh kondisi ekonomi eksternal.

Jika dibandingkan antarprovinsi, data menunjukkan bahwa DI Yogyakarta konsisten memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi di Pulau Jawa sepanjang periode 2014–2023. Pada tahun-tahun awal, angka TPAK Yogyakarta sudah melampaui 67 persen, kemudian meningkat signifikan hingga mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 74,08 persen. Tingginya angka ini tidak lepas dari dominasi sektor jasa, pariwisata, serta pendidikan yang mampu menyerap tenaga kerja secara konsisten, meskipun sempat terdampak pandemi pada 2020.

Di sisi lain, Jawa Barat cenderung mencatat angka TPAK yang lebih rendah dibandingkan provinsi lain. Bahkan pada 2015 dan 2016, Jawa Barat hanya mencatatkan 60,34 persen dan 60,65 persen, angka yang merupakan titik terendah di Pulau Jawa. Meskipun demikian, tren positif mulai terlihat setelah 2017 dengan peningkatan bertahap hingga mencapai 66,49 persen pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa industrialisasi di kawasan Bekasi, Karawang, dan sekitarnya semakin mampu menyerap tenaga kerja dalam beberapa tahun terakhir.

Jawa Tengah dan Jawa Timur menempati posisi menengah dengan angka yang relatif stabil. Jawa Tengah memulai periode dengan 69,68 persen pada 2014, lalu meningkat hingga 71,72 persen pada 2023. Sementara Jawa Timur pada awalnya mencatat 68,12 persen, kemudian naik konsisten hingga 72,56 persen di akhir periode. Kedua provinsi ini memperlihatkan ketahanan pasar kerja yang kuat, didukung oleh kombinasi sektor pertanian, industri, dan perdagangan.

DKI Jakarta menunjukkan pola yang lebih fluktuatif dibanding provinsi lain. TPAK sempat tinggi pada 2014 sebesar 66,61 persen, namun turun drastis ke 61,97 persen pada 2017, sebelum akhirnya kembali meningkat menjadi 65,21 persen pada 2023. Kondisi ini mencerminkan bahwa pasar kerja Jakarta sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional dan global, khususnya pada sektor jasa dan industri kreatif.

Sementara itu, Banten mencatat angka TPAK yang cenderung lebih rendah dan berfluktuasi di kisaran 62–64 persen. Meskipun terdapat

peningkatan kecil pada 2020 hingga 64,48 persen, angka tersebut tidak menunjukkan pergerakan signifikan dan justru sedikit menurun pada 2023 menjadi 64,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan di Banten, yang bertumpu pada sektor industri dan jasa, masih sangat rentan terhadap kondisi ekonomi eksternal.

Secara umum, perbandingan antarprovinsi menunjukkan bahwa DI Yogyakarta dan Jawa Timur merupakan daerah dengan tren peningkatan TPAK paling konsisten, sementara Jawa Barat dan Banten masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas partisipasi kerja. Sementara itu, DKI Jakarta menempati posisi menengah dengan fluktuasi yang cukup tajam, sedangkan Jawa Tengah menunjukkan kestabilan dengan tren kenaikan moderat.

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Meskipun angka kemiskinan nasional cenderung menurun, Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan tetap menyimpan permasalahan ketimpangan sosial yang serius. Pulau Jawa yang menampung lebih dari separuh penduduk Indonesia memiliki dinamika pembangunan yang sangat cepat, namun masih menghadapi perbedaan tingkat kesejahteraan antarprovinsi. Hal ini menjadikan Pulau Jawa sebagai wilayah yang relevan dan strategis untuk diteliti lebih jauh terkait faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan.

Berdasarkan uraian mengenai hubungan antara kemiskinan, penanaman modal asing (PMA), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan indeks pembangunan manusia (IPM), dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena ekonomi dan sosial yang kompleks serta multidimensional. Dari sisi makroekonomi, kemiskinan dapat ditekan melalui peningkatan investasi, khususnya penanaman modal asing, yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, manfaat PMA hanya dapat dirasakan secara optimal apabila diiringi dengan pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Dari sisi ketenagakerjaan, TPAK mencerminkan seberapa besar penduduk usia produktif yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Semakin tinggi partisipasi angkatan kerja, semakin besar peluang masyarakat untuk memperoleh penghasilan dan keluar dari jerat kemiskinan. Namun, apabila peningkatan TPAK tidak diiringi dengan tersedianya lapangan kerja produktif dan berupah layak, maka kemiskinan justru dapat tetap bertahan. Oleh karena itu, peningkatan TPAK harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pekerjaan yang tersedia.

Sementara itu, dari sisi kesejahteraan masyarakat, IPM berperan sebagai indikator utama yang mencerminkan kemampuan individu dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. IPM yang tinggi menunjukkan meningkatnya kualitas hidup masyarakat, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Dengan kata lain, peningkatan IPM menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat produktif dan sejahtera.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penurunan kemiskinan tidak dapat dicapai hanya melalui satu dimensi kebijakan, melainkan melalui sinergi antara peningkatan investasi asing (PMA), perluasan partisipasi tenaga kerja (TPAK), serta penguatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan IPM. Ketiga variabel tersebut saling berhubungan dan membentuk sistem ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “*Determinan Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2014–2023*” menjadi relevan untuk dilakukan, guna menganalisis secara empiris bagaimana ketiga faktor utama tersebut memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah dengan dinamika ekonomi paling aktif di Indonesia, yaitu Pulau Jawa.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kemiskinan pada 6 provinsi di pulau jawa dalam periode tahun 2014-2023. Dengan demikian adapun batasan dan rumusan masalah dibuat untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak menyimpang dan tetap fokus pada pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian yaitu provinsi-provinsi di Pulau Jawa.
2. Periode tahun pada penelitian ini adalah 2014-2023.

3. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; indeks pembangunan manusia, investasi penanaman modal asing, tingkat partisipasi angkatan kerja dan kemiskinan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat disusun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dari indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di pulau Jawa pada tahun 2014-2023?
2. Bagaimana pengaruh dari penanaman modal asing terhadap kemiskinan di pulau Jawa pada tahun 2014-2023?
3. Bagaimana pengaruh dari tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di pulau Jawa pada tahun 2014-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan diapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengaruh dari indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di pulau Jawa pada tahun 2014-2023.
2. Untuk menjelaskan pengaruh dari penanaman modal asing terhadap kemiskinan di pulau Jawa pada tahun 2014-2023.
3. Untuk menjelaskan pengaruh dari tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di pulau Jawa pada tahun 2014-2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan ruang kepada penulis untuk menambah wawasan dan ilmu serta apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi Yogyakarta.

2. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa dijadikan acuan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk memajukan ekonomi di provinsi Yogyakarta.

3. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi untuk penelitian yang lebih lanjut terhadap perekonomian di provinsi Yogyakarta.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat tentang bagian-bagian yang disajikan pada sebuah penelitian dalam bentuk narasi. Adanya sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun penelitian ini. Pada penelitian ini, terbagi atas beberapa bagian dalam uraian penelitian yang disusun secara sistematis. Berikut merupakan sistematika penulisan pada penelitian ini:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian. Penjelasan

disampaikan dari kondisi umum hingga ke persoalan khusus yang ingin diteliti. Selain itu, bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai, serta manfaat teoritis maupun praktis dari penelitian. Untuk memberikan gambaran awal bagi pembaca, bab ini juga menjelaskan batasan studi serta sistematika penulisan dari keseluruhan isi skripsi.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan berbagai teori yang menjadi dasar untuk mendukung analisis penelitian. Kajian pustaka ini mencakup teori-teori relevan terkait Indeks Pembangunan Manusia, investasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, disertakan pula hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Penjelasan ini digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran serta merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam proses penelitian. Isi dari bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab ini juga mencantumkan definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan, termasuk indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil analisis yang diperoleh dari pengolahan data yang telah dikumpulkan. Hasil tersebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau uraian deskriptif, kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan teori maupun temuan penelitian sebelumnya. Pembahasan dalam bab ini memberikan pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara variabel-variabel penelitian dan menginterpretasikan signifikansi hasil temuan.

5. Bab V Penutup

Bab terakhir ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Simpulan disajikan secara ringkas namun padat. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang bersifat praktis maupun akademis, baik bagi pemerintah, pelaku kebijakan, maupun peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan kajian serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini menyimpulkan bahwa kemiskinan di Pulau Jawa dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang diteliti melalui pendekatan regresi data panel dengan Fixed Effect Model. Berdasarkan hasil estimasi, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan nilai koefisien sebesar $-0,08083$ dan probabilitas $0,0212 (< 0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM yang mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara nyata. Temuan ini sejalan dengan teori human capital yang menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat sehingga berdampak pada penurunan kemiskinan.

Sementara itu, variabel Penanaman Modal Asing (PMA) yang diukur melalui LOG(PMA) menunjukkan koefisien positif sebesar $0,005839$ dengan probabilitas $0,8295 (> 0,05)$, yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini mengindikasikan bahwa masuknya investasi asing belum mampu secara langsung menurunkan kemiskinan, kemungkinan karena masih terpusat pada sektor tertentu, kurang menyerap tenaga kerja miskin, atau belum merata secara spasial. Selanjutnya, variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, dengan koefisien $-0,01081$ dan probabilitas $0,1479 (> 0,05)$. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun partisipasi

angkatan kerja meningkat, hal tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan pendapatan yang memadai untuk menekan kemiskinan. Variabel jumlah penduduk sebagai variabel kontrol yang direpresentasikan dengan LOG(PDD) menunjukkan koefisien $-0,71078$ dengan probabilitas $0,176$ ($> 0,05$), yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, meskipun arahnya negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang besar tidak selalu meningkatkan kemiskinan apabila diiringi dengan pemanfaatan bonus demografi dan peningkatan kualitas populasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa faktor kualitas manusia memiliki peran paling krusial dalam menekan kemiskinan dibandingkan faktor investasi, partisipasi tenaga kerja, maupun jumlah penduduk. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah maupun nasional perlu difokuskan pada peningkatan IPM melalui pemerataan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan standar hidup masyarakat miskin. Selain itu, dibutuhkan optimalisasi PMA agar lebih inklusif dan berpihak pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan, serta pengelolaan potensi jumlah penduduk secara produktif. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan di Pulau Jawa akan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan temuan empiris penelitian ini.

H. Keterbatasan dan Saran

Penelitian mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemiskinan di Pulau Jawa ini menyajikan temuan penting, namun tetap memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan hasil

penelitian. Pertama, keterbatasan muncul dari pemilihan variabel independen yang hanya mencakup tiga indikator utama. Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, investasi, dan partisipasi tenaga kerja, tetapi juga oleh variabel lain seperti pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, ketimpangan pendapatan, dan kualitas infrastruktur. Variabel-variabel tersebut tidak dimasukkan ke dalam model karena keterbatasan ketersediaan data panel yang konsisten pada rentang waktu penelitian. Konsekuensinya, model mungkin belum sepenuhnya menjelaskan variasi kemiskinan secara komprehensif. Kedua, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data dari lembaga tersebut. Ketidaksesuaian antarperiode, revisi data, atau perubahan metode pencatatan statistik dapat memengaruhi reliabilitas estimasi. Ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada Pulau Jawa. Meski Pulau Jawa mewakili pusat ekonomi Indonesia, karakteristik kemiskinan di wilayah ini berbeda dengan wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, atau Papua yang memiliki struktur ekonomi, distribusi penduduk, dan tingkat pembangunan yang berbeda. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan keterbatasan yang ada diatas terdapat saran yang dapat peneliti berikan dengan tujuan untuk meningkatkan penelitian selanjutnya untuk masa mendatang. Saran diberikan juga bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan memberikan kontribusi yang lebih untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Pulau Jawa. Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi instansi atau pemerintah

Pemerintah diharapkan memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sejalan dengan perspektif *Human Capital Theory*. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat agar peningkatan IPM tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin. Pemerintah juga perlu mengarahkan Penanaman Modal Asing (PMA) pada sektor-sektor yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja tinggi, sesuai dengan kerangka teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, sehingga investasi yang masuk memberikan dampak yang lebih inklusif. Selain itu, kebijakan ketenagakerjaan harus difokuskan pada peningkatan partisipasi dan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasional, sertifikasi kompetensi, dan peningkatan hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri agar TPAK dapat benar-benar menurunkan tingkat kemiskinan.

2. Bagi peneliti atau akademisi

Penelitian dalam masa mendatang diharapkan dapat menggunakan variabel yang berbeda seperti penanaman modal dalam negeri, tingkat pengangguran dan faktor ekonomi yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih luas terhadap kemiskinan. Selain itu objek yang pada penelitian ini hanya mencakup Pulau Jawa dan dalam periode hanya pada tahun 2014-2023 diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk memperluas objek penelitian dan periode waktu. Sehingga dapat diperoleh perspektif yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahman, P. A., Firman, F., & Rusdinal, R. (2019). Kemiskinan dalam perspektif ilmu sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(3), 1542–1548.
- Aprianto, N. E. K. (2018). Kemiskinan dalam perspektif ekonomi politik Islam. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 169–188.
- Rarasati, D. (2007). Kemiskinan struktural dan akses ekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba*, 1(2), 201–210.
- Nahak, K. L. (2022). Determinanan faktor sosial dan ekonomi terhadap kemiskinan penduduk di Indonesia. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(4).
- Apriyanti, M., & Rospida, L. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia 2014 – 2023. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*.
- Darma, R. D., Muslihatinningsih, F., & Adenan, M. (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekuilibrium*, 8(1), 42–57.
- Heriyansyah, S. (2024). Analysis of the Effect of Poverty and Economic Growth on Human Development Index in Kalimantan. *Jurnal SARJBM, Universitas Tanjungpura*.
- Nurcholifah, I. (2024). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Development Economics and Social Studies (JDESS)*.
- Wulandari, D., & Prasasti, G. P. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendidikan terhadap Kemiskinan. *Journal of Economics and Policy Studies (JEPS)*, 5(1).

- Azaria, S. P., & Sihalohe, E. D. (2021). Impacts of Foreign Direct Investment on Poverty Eradication in ASEAN-5 Countries. *Trikonomika: Jurnal Ekonomi*, 20(2), 62–70.
- Do, Q. A., et al. (2021). Spatial Impact of Foreign Direct Investment on Poverty Reduction in Vietnam. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(7), 292.
- Goh, L. T., Trinugroho, I., Law, S. H., & Rusdi, D. (2024). Institutional quality, FDI inflows, human capital development and poverty: a case of Indonesia. *International Journal of Social Economics*.
- Prawoto, N. (2024). Determinants of Poverty in Indonesia: A Dynamic Panel Analysis of Economic and Social Factors across 20 Provinces. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 3(3).
- Delviera, A., & Amar, S. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum dan Investasi terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*.
- Mutaqqin, M., & Anwar, K. (2024). Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia (1991–2021). *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*.
- Pasaribu, R., Batubara, M., & Rahmani, N. A. B. (2023). Pengaruh Tenaga Kerja, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2).
- Yurina, & Mislal, M. (2024). The Effect of Economic Growth, Human Development Index and Labor Force Participation Rate on Poverty in Aceh Province. *Journal of Malikussaleh Public Economics*.
- Abdillah, S. A. Q. (2023). Analisis Pengaruh Human Capital terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2017-2021. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2).

- Abrianti, S., & Suchaina, S. (2023). Peran Pendidikan dan Kesehatan dalam Mengurangi Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia: *Pendekatan Human Capital*. *Jurnal Ekonomi-Qu*.
- Permatasari, A. (2024). Kemiskinan diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif *Jurnal Administrasi Publik (Untirta)*.
- Marsitadewi, K. E. (2024). Kemiskinan Struktural di Karangasem: Menganalisis Penyebab dan Intervensi Pemerintah. *Gema Gayo: Jurnal Sosial & Kebudayaan*.
- Firdaus, A., Dawood, T. C., & Abrar, M. (2021). Determinants of Poverty in Indonesia: An Empirical Evidence using Panel Data Regression. *International Journal of Global Operations Research*, 2(4), 124-132.
- Makhrus, M. (2022). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).
<https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>
- Ahyani, S. (2021). Zakat dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11159>
- Baihaqi. (2023). Pemberdayaan Orang Miskin dalam Al-Qur'an: Studi Konsep Zakat Perspektif Quraissy Shihab. *GOSE: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).<https://doi.org/10.52029/gose.v2i2.235>
- Suryani, D. & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43-62.
<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education.

- Sodik, J., & Nuryadin, D. (2020). Foreign Direct Investment and Poverty Reduction: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 45-60.
- Fauzi, A., & Dhewanto, W. (2017). Foreign Direct Investment and Technology Spillover in Indonesia's Manufacturing Sector. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 16(2), 173–188. <https://doi.org/10.12695/jmt.2017.16.2.6>
- Iskandar, A., & Wibowo, A. (2019). Foreign Direct Investment and Employment Creation in Indonesia: Evidence from Panel Data. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 140–152.
- Sari, D., & Oktaviani, R. (2015). The Role of Foreign Direct Investment in Indonesia's Export Performance. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 4(1), 27–40. <https://doi.org/10.29244/jekp.4.1.27-40>
- Sodik, J., & Nuryadin, D. (2020). Foreign Direct Investment and Poverty Reduction: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 45–60.
- Suyanto, & Salim, R. A. (2010). Foreign direct investment spillovers and productivity growth in Indonesian manufacturing: Evidence from plant- level panel data. *Journal of Development Studies*, 46(8), 1389–1409. <https://doi.org/10.1080/00220381003706494>
- Putri, A. R., & Setiawan, M. (2017). Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 6(2), 123–136.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Dampak Investasi Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 45–60.
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data*. 6th Edition. Springer.
- Hsiao, C. (2014). *Analysis of Panel Data*. 3rd Edition. Cambridge University Press.

- Samiani, N. (2024). Dynamic Panel Data Modeling of Indonesia's Poverty Level. *Journal of Economics and Policy (JEJAK)*, 17(1), 45–60.
- Swastika, A. (2023). Analisis Regresi Data Panel terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 9(2), 112–126.
- Riyandini, E. (2022). Penerapan Model Regresi Data Panel dalam Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Provinsi Papua. *Jurnal EurekaMatika*, 10(4).
<https://ejournal.upi.edu/index.php/JEM/article/view/74235>
- Rahmad Setiyoko. (2018). Analisis Heteroskedastisitas dengan Metode Weighted Least Squares pada Data Panel di Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2006-2013. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Dewi, I. K. (2021). Analisis Data Panel Untuk Memprediksi Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Swara MaNajemen*, 2(3).
- Candra, S. F., & Irmeilyana, I. (2022). Model Regresi Data Panel pada Pengaruh Faktor Curah Hujan Terhadap Produksi Kopi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021. *Jurnal Penelitian Sains, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indikator Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023. Jakarta
- Nugraha, R. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 11(2), 101–113.
- Fadilah, N. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 20(2), 145–158.
<https://doi.org/10.21009/jepi.0202.06>

- Hidayat, R. (2022). Analisis Pengaruh IPM, PMA, dan TPAK terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 33–47.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/2781>
- Putri, A. D., & Nugroho, H. (2021). Dampak Penanaman Modal Asing terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(1), 45–57.
- Suryani, I., & Wibowo, S. (2020). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Regional*, 8(3), 210–221.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008). The Role of Cognitive Skills in Economic Development. *Journal of Economic Literature*, 46(3), 607–668.
<https://doi.org/10.1257/jel.46.3.607>
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to Investment in Education: A Decennial Review of the Global Literature. *Education Economics*, 26(5), 445–458.
<https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426>
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Pembangunan Manusia 2023. Jakarta: BPS.
<https://www.bps.go.id>